



# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Maninjau No.16-18 Kota Pekalongan



telp/fax.(0285)421878

[dindik.pekalongankota.go.id](http://dindik.pekalongankota.go.id)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 14 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



MABRURI, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19710503 199303 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025. Dinas Pendidikan pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendidikan pada tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Pendidikan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD dengan target yang ditetapkan 78,20.  
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Pendidikan sebesar 78,50 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,38%.
2. Indikator Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan dengan target yang ditetapkan 100%.  
Berdasarkan hasil input capaian SPM pada aplikasi e-SPM Kemendagri, indeks SPM Pendidikan pada tahun 2025 sebesar 87,77% dengan kategori Tuntas Utama. Sehingga capaian untuk indikator Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 87,77%.
3. Indikator Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal dengan target yang ditetapkan 100%.  
Pada tahun 2025, 100% sekolah sudah menjalankan kurikulum muatan

lokal. Sehingga capaian untuk indikator Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal sebesar 100%.

Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 228.089.854.182 atau 92,19% dari total pagu anggaran sebesar Rp 247.425.579.000

Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Faktor sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan dan rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok rentan , ditunjukkan dengan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun yang ada di Kota Pekalongan yang belum mendapatkan layanan pendidikan
  - b. Keterbatasan tenaga pendidik maupun pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), baik untuk pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan
  - c. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Di sisi lain, beban administrasi guru yang tinggi berpotensi mengurangi fokus pada peningkatan kualitas layanan
- Guna peningkatan kinerja di masa mendatang, diperlukan langkah

ke depan sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Bapperida, Kelurahan, serta unsur masyarakat dalam penanganan ATS
- b. Mengupayakan adanya kerjasama dengan kelurahan dalam upaya mendekatkan layanan pendidikan kesetaraan kepada para ATS yang telah bekerja maupun memiliki kendala lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat ATS untuk kembali bersekolah
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang berwenang mengelola pendidikan khusus (SLB) dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten menangani siswa berkebutuhan khusus.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1     LATAR BELAKANG .....	1
1.2     GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3     KONDISI APARATUR .....	7
1.4     SARANA PRASARANA .....	8
1.5     ISU STRATEGIS .....	9
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1     RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 .....	11
2.2     INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 .....	19
2.3     PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	21
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
3.1     PENGUKURAN KINERJA .....	25
3.2     EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	29
3.3     AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	49
3.4     PRESTASI YANG DIRAIH .....	57
3.5     INOVASI .....	60
BAB IV     PENUTUP .....	62
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan .....	7
Tabel 1.3.2 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan .....	7
Tabel 1.4.1 Sarana Prasarana Dinas Pendidikan tahun 2025.....	8
Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.2.1 Target Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 .....	19
Tabel 2.2.2 Target Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 .....	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan .....	22
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .....	28
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 .....	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya .....	30
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026 .....	31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan target Propinsi / Nasional/ Internasional .....	32
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025 ...	33
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	33
Tabel 3.8 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 .....	34
Tabel 3.9 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 .....	35

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	40
Tabel 3.11 Perbandingan indeks capaian SPM Pendidikan Tahun 2025 .....	41
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian SPM Pendidikan dengan target Nasional.....	42
Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 .....	47
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

### 1.2.1. Deskripsi Perangkat Daerah

Visi pembangunan Kota Pekalongan dalam RPJMD 2021-2026 menekankan pada Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius. Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Dari sisi urusan pendidikan melaksanakan misi ke-2 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan, dan misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Merujuk pada Peraturan Walikota Pekalongan nomor 83 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang bermutu di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas.

#### 1.2.2. Tugas dan fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program di bidang pendidikan;
- b. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan ;
- h. pengkoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pendidikan;
- j. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang

- tugasnya;
- k. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 1.2.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang SD, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
  - 2) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SD;
- d. Bidang SMP, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana SMP
  - 2) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum SMP
- e. Bidang PAUD dan PNF
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
  - 2) Seksi Peserta Didik dan Kurikulum PAUD dan PNF
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Administrasi dan Pembinaan PTK;
  - 2) Seksi Pendataan dan Penatan PTK;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

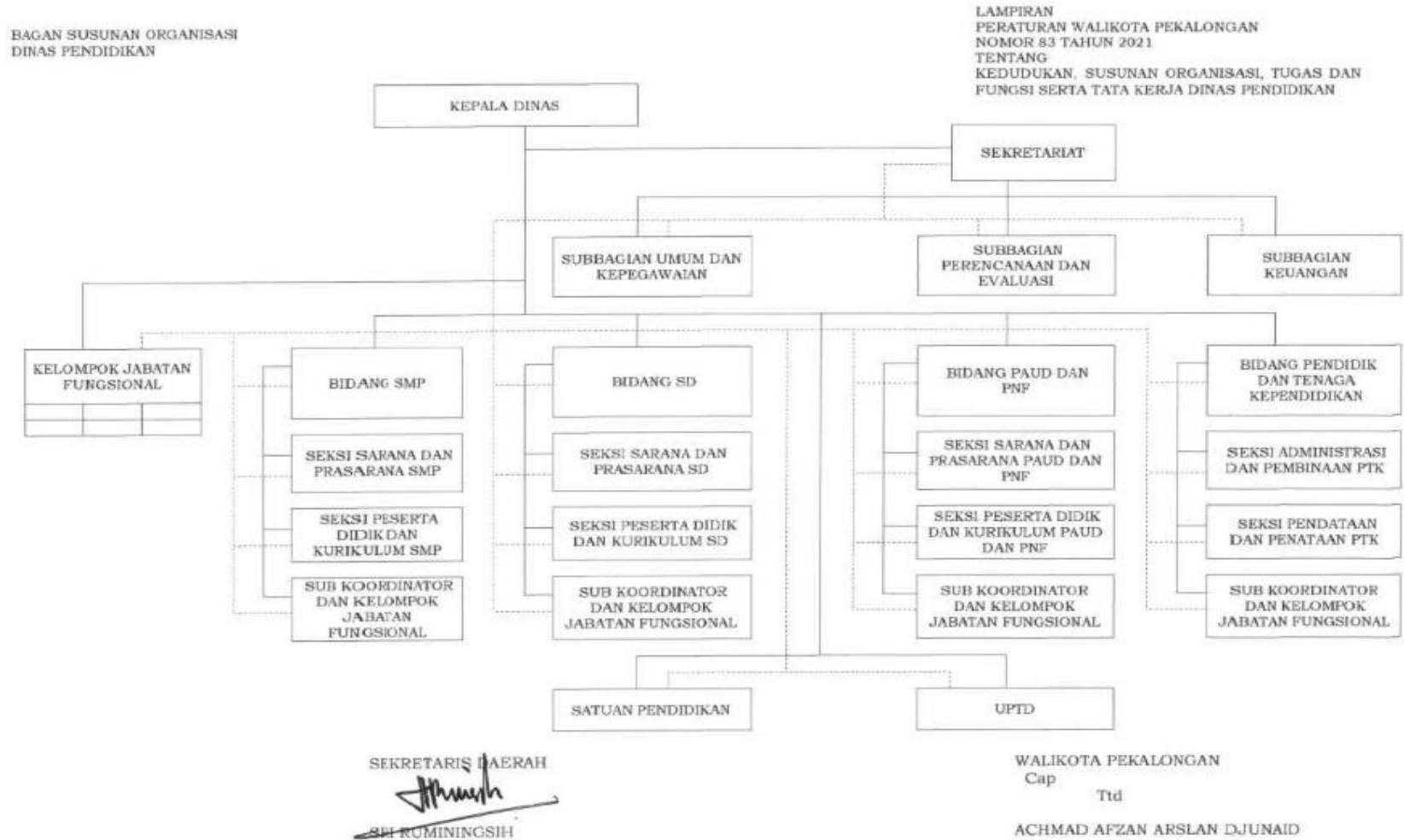
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

- 1) Jabatan Fungsional Pengawas SD;
- 2) Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
- 3) Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;
- 4) Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal;
- 5) Jabatan Fungsional Widyaprada;
- 6) Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- 7) Jabatan Fungsional Arsiparis.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



### 1.3. Kondisi Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota di dukung oleh 102 orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.3.1**  
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai  
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		< SLTA	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	Sekretariat	3	9	6	12			18	12	30
2	Bidang SD		1	3	3	2	1	5	5	10
3	Bidang SMP		3		4	3		5	5	10
4	Bidang PAUD PNF		1	2	5	1		3	6	9
5	Bidang PTK		3	1	3	1		3	5	8
6	Fungsional Pengawas / Penilik				7	14		12	9	21
7.	ULD Lakondik				9	1		1	9	10
8.	SKB				4			1	3	4

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 31 Desember 2025*

**Tabel 1.3.2**  
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan  
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)						TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	PPPK Paruh Waktu	NON ASN	
1	Sekretariat	4	7	1	1	12	15	30
2	Bidang SD	1	3	2	2	1	1	10
3	Bidang SMP	2	3	3	1	1	2	10
4	Bidang PAUD PNF	1	3	1	1	2	1	9
5	Bidang PTK	2	4	-	1		1	8
6	Fungsional Pengawas / Penilik	-	2	19	-		-	21
7.	ULD Lakondik	-	-	-	-	2	8	10
8.	SKB	-	3	-	-		1	4

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 31 Desember 2025*

#### 1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Sarana prasarana pada Dinas Pendidikan meliputi bangunan gedung kantor, peralatan dan mesin dan perlengkapan kantor. Dinas Pendidikan juga telah memiliki ruangan khusus untuk pelayanan, ruang laktasi, toilet untuk penyandang disabilitas, hal ini dalam rangka menunjang pemberian layanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan Dinas Pendidikan. Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam keadaan baik, meskipun ada yang membutuhkan perawatan atau pemeliharaan.

Berikut kami sajikan data sarana prasarana Dinas Pendidikan

Tabel 1.4.1

Sarana Prasarana Dinas Pendidikan tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1.	Tanah	3	Unit
2.	Alat Besar	2	Unit
3.	Alat Angkutan	28	Unit
4.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	Unit
5.	Alat Pertanian	-	Unit
6.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	572	Unit
7.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	31	Unit
8.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	Unit
9.	Alat Laboratorium	36	Unit
10.	Alat Persenjataan	-	Unit
11.	Komputer	217	Unit
12.	Alat Eksplorasi	-	Unit
13.	Alat Pengeboran	-	Unit
14.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	Unit
15.	Alat Bantu Eksplorasi	-	Unit
16.	Alat Keselamatan Kerja	-	Unit
17.	Alat Peraga	-	Unit
18.	Peralatan Proses/Produksi	-	Unit
19.	Rambu - Rambu	-	Unit
20.	Peralatan Olah Raga	-	Unit
21.	Bangunan Gedung	11	Unit
22.	Monumen	-	Unit
23.	Bangunan Menara	-	Unit
24.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	Unit
25.	Jalan Dan Jembatan	-	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
26.	Bangunan Air	-	Unit
27.	Instalasi	1	Unit
28.	Jaringan	1	Unit
29.	Bahan Perpustakaan	-	Eksemplar
30.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3	Unit
31.	Hewan	-	Ekor
32.	Biota Perairan	-	Ekor/Buah
33.	Tanaman	-	Buah
34.	Barang Koleksi Non Budaya	-	Unit
35.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Pekerjaan
36.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	Pekerjaan
37.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	Unit
38.	Aset Tidak Berwujud	19	Aplikasi
39.	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	-	Unit
40.	Aset Lain-lain (Non Aktif)	-	Unit

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025*

## 1.5. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Pemenuhan mutu dan capaian SPM Pendidikan sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, salah satunya berupa keterjangkauan biaya pendidikan melalui peningkatan bantuan fasilitasi operasional pendidikan, pemberian perlengkapan dasar siswa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin serta siswa yatim dan rentan.
3. Fasilitasi pendidikan inklusi melalui optimalisasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, SKB Negeri, peningkatan kapasitas guru pendamping khusus, optimalisasi ULD ( Unit Layanan Disabilitas ) Lakondik serta memperkuat dan menambah jejaring mitra
4. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar dapat kembali bersekolah salah satunya dengan optimalisasi layanan SKB Negeri dan PKBM.
5. Penguatan kompetensi PTK dan Peningkatan profesionalisme serta kualifikasi guru yang diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan PAUD, SD dan SMP.
6. Peningkatan kualitas dan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan bagi peserta didik dan didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.
7. Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dengan merehabilitasi dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang layak / memadai dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah banjir/rob
8. Dukungan terhadap Program prioritas Kemendikdasmen seperti Program Wajib Belajar 13 tahun, pembelajaran mendalam (*deep learning*), pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial serta penguatan karakter melalui implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) dan pelatihan guru BK
9. Peningkatan pengelolaan layanan publik dalam rangka mewujudkan kepatuhan sistem pelayanan

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2.1. Rencana Strategis tahun 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

*Tujuan* adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

*Sasaran* adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

Tabel 2.1.

## Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-2 : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		
Tujuan Kota : Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	75,88
Tujuan Dinas Pendidikan : Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100%
Sasaran Dinas Pendidikan : Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	100%
Program Dinas Pendidikan : Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Dinas Pendidikan : 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100%
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2. Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD / PNF	100%
Tujuan Dinas Pendidikan : Meningkatkan Akses Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9,75
Sasaran Dinas Pendidikan : Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100%
Program Dinas Pendidikan : Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Dinas Pendidikan : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100%
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100%
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100%
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100%
Program Dinas Pendidikan : Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Dinas Pendidikan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100%
Misi Ke-7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	74,69
Tujuan Dinas Pendidikan : Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,43
Sasaran Dinas Pendidikan : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78,20

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Program Dinas Pendidikan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
Kegiatan Dinas Pendidikan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%
Program Dinas Pendidikan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Kegiatan Dinas Pendidikan : 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Program Dinas Pendidikan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
Kegiatan Dinas Pendidikan : 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Pendidikan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber data
1	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	Jumlah sekolah formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal / jumlah sekolah formal	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	Capaian SPM Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai SAKIP tahun N	Inspektorat

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

**Tabel 2.2.2**  
**Target Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2025	2025	2025	2026
1	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan local	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.50	76.00	77.50	78.00	78.20	78.40

### 2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,43 Indeks	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9,75 Tahun	Formulasi : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik
3.	Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100 %	Formulasi : Jumlah satuan pendidikan yg menerapkan kurikulum pendidikan karakter / jumlah satuan pendidikan) + (Jumlah satuan pendidikan yg mengajarkan pelajaran agama/ jumlah satuan pendidikan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik
<b>Sasaran :</b>				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	78,20 Indeks	Formulasi : Nilai SAKIP Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya capaian SPM pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	Formulasi : Capaian SPM Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik
3.	Terimplementasinya kurikulum muatan lokal sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	100 %	Formulasi : Jumlah sekolah formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal / jumlah sekolah formal Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik

Program	Anggaran ( Rp )	Keterangan
1. Pengelolaan Pendidikan	57.699.214.000	APBD-P
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.795.323.000	APBD-P
3. Pengembangan Kurikulum	81.800.000	APBD-P
4. Penunjang Pemerintahan Daerah Kota	174.849.242.000	APBD-P

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
- Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**  
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**  
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**  
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**  
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**  
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**  
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan

rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

## 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	100.00%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100	87,77	87,77%	Berhasil
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	78.20	78.50	100.38%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan realisasi capaian 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 96,05 % dengan kategori sangat berhasil.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi				ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	77.05	78	78.45	78.50	▲
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	90.94	99.67	99.12	87,77	▼
3	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	100	100	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	78.50	78.40	100.13%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	87,77	100	87,77%	Berhasil
3	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa perbandingan realisasi capaian kinerja utama dengan target akhir renstra 2026 dari 3 sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil. Sasaran 1 dengan persentase capaian 100%, Sasaran 2 dengan persentase capaian 87,77% dan Sasaran 3 dengan persentase capaian 100.13%

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025**  
**dengan target Propinsi / Nasional/ Internasional**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Propinsi/Nasional/Internasional	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	78.50	-	-	-
2	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	87,77	100	87,77%	Berhasil
3	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100	-	-	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator Indikator Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan belum mencapai target nasional. Adapun Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	80,43	90,10	112,02%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.75	9.35	95.90%	Berhasil
3	Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan realisasi capaian 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 102.64 % dengan kategori Sangat Berhasil.

### 3.2.2. Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	%	

								Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	78,00	Indeks	78,00	78,45	78,20	78,50	100,38%	78,40

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memperoleh nilai 78,50 atau predikat "Sangat Baik ( BB )". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan**  
**Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik ( BB )	

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah**  
**di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025**

No.	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
	<b>KOTA PEKALONGAN</b>	<b>73,28</b>
1	BKPSDM	84.00
2	Inspektorat Daerah	84.75
3	BPKAD	84.60
4	DKP	83.27
5	Dinkes	83.25
6	Dindukcapil	82.95
7	Setda	81.85
8	Dindagkop-UKM	85.70
9	DPMPPA	83.55
10	Bapperida	88.70
11	Kec. Utara	76.65
12	Dinsos P2KB	76.35
13	Kec. Barat	76.50
14	Dinperpa	76.40
15	Bakesbangpol	73.75
16	Kec. Timur	76.45
17	Kec. Selatan	77.15
18	DPMPTSP	78.00
19	Dindik	78.50
20	Dinperkim	74.80
21	Dinperinaker	75.45
22	Dinhub	77.00
23	Set DPRD	75.00
24	Satpol P3KP	75.50
25	Dinarpus	76.10
26	Dinparbudpora	78.15
27	BPBD	76.00
28	DPUPR	83.05
29	DLH	85.95
30	Dinkominfo	83.50

*Sumber : Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2025*

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP (faktor internal);
- b. Adanya monitoring rutin capaian kinerja dan realisasi anggaran serta tindak lanjut hasil evaluasi berjalan secara efektif (faktor internal);
- c. Adanya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (faktor internal);
- d. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah (faktor internal);
- e. Peran aktif APIP ( inspektorat ) melalui review dokumen perencanaan dan pelaporan serta pemberian rekomendasi yang konstruktif ( Faktor eksternal ) ;
- f. Tuntutan akuntabilitas publik sehingga meningkatkan keseriusan dalam mengelola kinerja ( Faktor eksternal ).

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mendukung Indikator Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,750,000	99,534,000	97,485,797	Melalui kegiatan ini , beberapa sub kegiatan di dalamnya menunjang implementasi SAKIP yang meliputi komponen sebagai berikut : 1. Evaluasi atas perencanaan kinerja 2. Evaluasi atas pengukuran kinerja 3. Evaluasi atas pelaporan kinerja
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	162,556,182,000	173,124,041,000	155,811,469,646	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87,880,000	88,048,000	87,789,428	

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mendukung Indikator Kinerja
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	0	0	4. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556,489,000	532,437,000	526,998,733	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674,873,000	675,299,000	626,446,094	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,883,000	329,883,000	324,232,500	
Total		164,150,057,000	174,849,242,000	157,474,422,198	
Persentase Realisasi (%)			90.06%		

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Anggaran : Rp 99.534.000</p> <p>Realisasi : Rp 97.485.797 ( 97,94% )</p> <p>Terdapat penghematan 2,06% senilai 2.048.203</p>	-	Penggunaan platform digital ( Aplikasi SIPD, Aplikasi SEKSAMA) memungkinkan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi dapat berjalan lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Anggaran : Rp 173.124.041.000</p> <p>Realisasi : Rp 155.811.469.646 ( 90% )</p> <p>Terdapat penghematan 10% senilai Rp 17.312.571.354 yang berasal dari Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum terserap. TPG bersumber dari dana DAK Non Fisik.</p>	-	Penggunaan platform digital ( Aplikasi SIPD), memungkinkan proses pelaporan dan penatausahaan keuangan dapat berjalan lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<p>Anggaran : Rp 88.048.000</p> <p>Realisasi : Rp 87.789.428 ( 98% )</p> <p>Terdapat penghematan 2% senilai Rp 258.572</p>	-	Penggunaan platform digital ( Aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA), memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan barang modal maupun barang persediaan dapat berjalan lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

No	KEGIATAN	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>Anggaran : Rp 532.437.000</p> <p>Realisasi : Rp 526.998.733 (99%)</p> <p>Terdapat penghematan 1% senilai Rp5.438.267 yang berasal dari sisa belanja penyediaan peralatan kantor</p>	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Anggaran : Rp 675.299.000</p> <p>Realisasi : Rp 626.446.094 (93%)</p> <p>Terdapat penghematan 7% senilai Rp 48.852.906 yang berasal dari sisa belanja daya listrik dan tagihan telepon serta belanja gaji tenaga non ASN yang tidak terserap optimal (jasa tenaga keamanan)</p>	<p>pada bulan Juni th 2025 salah satu personil tenaga kegiatan non ASN ( tenaga keamanan ) memasuki usia pensiun, sehingga dari segi kuantitas tenaga keamanan berkurang, meskipun demikian kinerja tim keamanan tetap berjalan dengan baik meskipun sempat terkendala di awal nya</p>	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Anggaran : Rp 329.883.000</p> <p>Realisasi : Rp 324.232.500 (98%)</p> <p>Terdapat penghematan 2% senilai Rp 5.650.500 yang berasal dari sisa belanja pembayaran pajak kendaraan bermotor ( kendaraan dinas)</p>	-	-

Kesimpulan efisiensi :

1. Terdapat penghematan anggaran pada kegiatan berikut :
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 2,06%
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 10%
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 2%
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sebesar 1%
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 7%
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 2%
2. Kinerja tim tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat personil yang memasuki pensiun;
3. Penyelesaian pekerjaan lebih cepat karena pemanfaatan platform digital

Sasaran 2 : Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan

Capaian indikator sasaran Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	99,67	Persen	99,67	99,12	100	87,77	87,77	100

Berdasarkan hasil input capaian SPM pada aplikasi e-SPM Kemendagri, indeks SPM Pendidikan pada tahun 2025 sebesar 87,77% dengan kategori Tuntas

Utama. Sehingga capaian untuk indikator Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 87,77%.

Hal ini menunjukkan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan ada beberapa capaian indikator mutu pada SPM yang belum mencapai target, yaitu, Indeks Iklim Inklusivitas, kemandirian dan keberagaman SD & SMP, Kemampuan Numerasi SMP dan APS 7-18 tahun. Capaian tersebut merupakan hasil dari rapor pendidikan. Selain itu masih terdapat Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun yang ada di Kota Pekalongan yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang disebabkan sebagian besar ATS kondisinya sudah bekerja full time dan lokasi tempat kerjanya jauh dari layanan pendidikan kesetaraan sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bersekolah karena kesulitan untuk menjangkau dan membagi waktunya. Selain itu masih terdapat ATS yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus dan kurang mendapatkan perhatian keluarganya, sehingga diperlukan tenaga pendidik maupun pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan ATS, sedangkan belum semua satuan pendidikan kesetaraan memilikinya.

Tabel 3.11 Perbandingan indeks capaian SPM Pendidikan Tahun 2025  
Kota Pekalongan dengan daerah lain

No	Kabupaten / Kota	Indeks SPM Pendidikan Tahun 2025
1	KOTA PEKALONGAN	87,77 %
2	KABUPATEN PEKALONGAN	100 %
3	KABUPATEN BATANG	100 %
4	KABUPATEN PEMALANG	98,48 %
5	KOTA TEGAL	89,91 %
6	KABUPATEN TEGAL	93,05 %

Sumber : *espm Bangda Kemendagri, 2025*

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian SPM Pendidikan dengan target Nasional

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Nasional 2025	% Capaian
1	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM Pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	87,77	100	87,77%

Sumber : Kemendikbud RI, 2025

Berikut analisis penyebab capaian kinerja sasaran ini belum mencapai target :

- a. Jumlah dan distribusi tenaga pendidik belum merata ( Faktor internal )
- b. Keterbatasan tenaga pendidik maupun pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terutama pada jenjang pendidikan kesetaraan ( Faktor internal )
- c. Beberapa indikator mutu SPM Pendidikan belum sesuai target yang ditetapkan, seperti Indeks Iklim Inklusivitas ,kemanan dan kebhinekaan SD & SMP, Kemampuan Numerasi SMP dan APS 7-18 tahun ( Faktor internal )
- d. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun yang ada di Kota Pekalongan yang belum mendapatkan layanan pendidikan ( Faktor eksternal )

Guna peningkatan capaian SPM Pendidikan di masa mendatang, perlu upaya perbaikan kedepan sebagai berikut :

- a. Mengupayakan adanya kerjasama dengan kelurahan dalam upaya mendekatkan layanan pendidikan kesetaraan kepada para ATS yang telah bekerja maupun memiliki kendala lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat ATS untuk kembali bersekolah

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang berwenang mengelola pendidikan khusus (SLB) dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten menangani siswa berkebutuhan khusus

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

## 2. Program Pengelolaan Pendidikan

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mendukung Indikator Kinerja
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24,408,931,000	26,576,204,000	26,285,919,628	Melalui kegiatan ini , beberapa sub kegiatan di dalamnya menunjang pencapaian indikator mutu layanan SPM, yaitu : Angka Partisipasi Sekolah, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, iklim kebhinekaan, iklim keamanan, iklim inklusivitas, akreditasi sekolah
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15,658,095,000	16,268,477,000	16,216,972,354	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,544,637,000	9,748,674,000	9,676,745,113	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4,724,670,000	5,105,859,000	5,080,465,389	
Total		55,336,333,000	57,699,214,000	57,260,102,484	
Persentase Realisasi (%)		99.24%			

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Anggaran : Rp 26.576.204.000 Realisasi : Rp 26.285.919.628 ( 98,91% ) Terdapat penghematan 1,09%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antarbidang sehingga menghindari	Penggunaan platform digital ( Aplikasi PEDATI) dalam pengumpulan data, memungkinkan proses

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
			duplikasi pekerjaan	pengolahan data, pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<p>Anggaran : Rp 16.268.477.000</p> <p>Realisasi : Rp 16.216.972.354 ( 99,68% )</p> <p>Terdapat penghematan 0,32%</p>	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antarbidang sehingga menghindari duplikasi pekerjaan	Penggunaan platform digital ( Aplikasi PEDATI) dalam pengumpulan data, memungkinkan proses pengolahan data, pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<p>Anggaran : Rp 9.748.674.000</p> <p>Realisasi : Rp 9.676.745.113 ( 99,26% )</p> <p>Terdapat penghematan 0,74%</p>	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antarbidang sehingga menghindari duplikasi pekerjaan	Penggunaan platform digital ( Aplikasi PEDATI) dalam pengumpulan data, memungkinkan proses pengolahan data, pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<p>Anggaran : Rp 5.105.859.000</p> <p>Realisasi : Rp 5.080.465.389 ( 99,50% )</p> <p>Terdapat penghematan 0,50%</p>	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antarbidang sehingga menghindari duplikasi pekerjaan	Penggunaan platform digital ( Aplikasi PEDATI) dalam pengumpulan data, memungkinkan proses pengolahan data, pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
				berbasis data.

Kesimpulan efisiensi :

1. Terdapat penghematan anggaran pada kegiatan berikut :
  - Kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar sebesar 1,09%
  - Kegiatan pengelolaan pendidikan SMP sebesar 0,32%
  - Kegiatan pengelolaan PAUD sebesar 0,74%
  - Kegiatan pengelolaan pendidikan non formal / kesetaraan sebesar 0,50%
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan kolaboratif antar bidang
3. Penyelesaian pekerjaan lebih cepat karena pemanfaatan platform digital

## 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mendukung Indikator Kinerja
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	15,722,300,000	14,795,323,000	13,273,716,000	Melalui kegiatan ini , beberapa sub kegiatan di dalamnya menunjang pencapaian indikator mutu layanan SPM, yaitu : Angka Partisipasi Sekolah, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, proporsi pendidik minimal S-1
Total		15,722,300,000	14,795,323,000	13,273,716,000	
Persentase Realisasi (%)		89.72%			

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan dalam Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<p>Anggaran : Rp 14.795.323.000</p> <p>Realisasi : Rp 13.273.716.000 ( 89,72% )</p> <p>Terdapat penghematan 10,28% senilai 1.521.607.000 yang berasal dari belanja bantuan Harlindung yang tidak terserap dikarenakan beberapa PTK non ASN penerima Harlindung telah diterima menjadi PPPK</p>	<p>Efisiensi SDM dilaksanakan melalui penataan dan optimalisasi distribusi PTK sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan layanan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan</p>	<p>Penggunaan platform digital ( Aplikasi PEDATI) dalam pengumpulan data, memungkinkan proses pengolahan data, pengambilan keputusan dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.</p>

Kesimpulan efisiensi :

1. Terdapat penghematan anggaran sebesar 10,28% :
2. Efisiensi SDM dilaksanakan melalui penataan dan optimalisasi distribusi PTK
3. Penyelesaian pekerjaan lebih cepat karena pemanfaatan platform digital

Sasaran 3 : Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah

Capaian indikator sasaran Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13

## Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	100	Persen	100	100	100	100	100%	100

Indikator Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi dan analisis terhadap sasaran 1 yaitu : Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah dengan indikator kinerja Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal, persentase capaian pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 100%, begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra berhasil tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa semua satuan pendidikan yang ada di Kota Pekalongan telah menjalankan kurikulum muatan lokal. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan implementasi kurikulum muatan lokal sekolah ( Faktor internal );
- b. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi implementasi kurikulum muatan lokal sekolah ( Faktor internal );
- c. Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi kurikulum muatan lokal sekolah ( Faktor internal );
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* dalam rangka implementasi kurikulum muatan lokal sekolah ( Faktor eksternal )

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Pengembangan Kurikulum

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mendukung Indikator Kinerja
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47,125,000	45,125,000	45,101,000	Melalui Kegiatan penetapan kurikulum mulok pendidikan dasar, PAUD dan PNF dapat memfasilitasi bentuk kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan silabus 2. Penyusunan capaian pembelajaran 3. Pelatihan 4. Cetak buku kurikulum mulok
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	36,675,000	36,675,000	36,512,500	
Total		83,800,000	81,800,000	81,613,500	
Persentase Realisasi (%)			99.77%		

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pengembangan Kurikulum

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Anggaran : Rp 45.125.000 Realisasi : Rp 45.101.000 ( 99,95% ) Terdapat penghematan 0,05%	-	-

No	Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Anggaran : Rp 36.675.000 Realisasi : Rp 36.512.500 ( 99,56% ) Terdapat penghematan 0,44%	-	-

Kesimpulan efisiensi :

Kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan penetapan kurikulum mulok PAUD PNF memiliki efisiensi berupa penghematan anggaran sekitar 0,33%. Hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah Rp 247.425.579.000 dan realisasi sebesar Rp 228.089.854.182 atau 92,19% . Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 74.824.730.000 dengan realisasi sebesar Rp 72.800.508.536 atau sebesar 97,29%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
	DINAS PENDIDIKAN	247,425,579,000	228,089,854,182	92.19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	174,849,242,000	157,474,422,198	90.06
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,534,000	97,485,797	97.94
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah	8,200,000	8,114,600	98.96
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,250,000	4,249,900	100.00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,084,000	85,121,297	97.75
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	173,124,041,000	155,811,469,646	90.00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	172,600,849,000	155,289,345,646	89.97
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	519,292,000	518,242,000	99.80
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,900,000	3,882,000	99.54
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88,048,000	87,789,428	99.71
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	88,048,000	87,789,428	99.71
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0.00
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0.00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532,437,000	526,998,733	98.98

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,500,000	9,487,500	99.87
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213,322,000	210,758,650	98.80
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,217,000	14,181,750	99.75
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82,000,000	81,994,500	99.99
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	14,985,750	99.91
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,900,000	2,898,400	99.94
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,054,000	74,039,080	99.98
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	121,444,000	118,653,103	97.70
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675,299,000	626,446,094	92.77
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	6,964,000	99.49
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290,997,000	263,302,098	90.48
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,302,000	356,179,996	94.40
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329,883,000	324,232,500	98.29
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,030,000	55,511,500	90.96
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218,853,000	218,721,000	99.94
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	50,000,000	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57,699,214,000	57,260,102,484	99.24
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26,576,204,000	26,285,919,628	98.91
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	150,573,000	150,573,000	100.00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200,000,000	195,301,800	97.65
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	88,750,000	86,691,000	97.68
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	143,650,000	142,249,997	99.03
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	680,000,000	680,000,000	100.00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	358,750,000	338,303,000	94.30
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,768,412,000	2,764,327,086	99.85
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7,680,000	7,679,900	100.00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	202,658,000	188,384,128	92.96
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17,848,653,000	17,662,323,772	98.96
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23,145,000	23,144,900	100.00
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13,500,000	12,496,000	92.56
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30,000,000	29,884,800	99.62
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	73,000,000	67,623,000	92.63
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	911,850,000	890,840,500	97.70
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	69,579,000	67,478,858	96.98
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	971,004,000	952,973,934	98.14

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,035,000,000	2,025,643,953	99.54
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16,268,477,000	16,216,972,354	99.68
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	53,660,000	52,003,000	96.91
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	374,808,000	369,300,345	98.53
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	101,000,000	99,222,800	98.24
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	598,595,000	597,242,200	99.77
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	80,000,000	78,522,700	98.15
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	34,400,000	33,391,000	97.07
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	191,250,000	186,475,000	97.50
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	331,500,000	322,742,500	97.36
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	329,400,000	321,903,810	97.72
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	293,554,000	292,126,525	99.51
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,630,000	9,630,000	100.00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	160,370,000	160,360,000	99.99
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13,270,982,000	13,259,128,799	99.91
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,280,000	15,280,000	100.00
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20,000,000	19,910,000	99.55

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35,000,000	34,321,000	98.06
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	36,100,000	35,441,000	98.17
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	109,500,000	106,523,675	97.28
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	223,448,000	223,448,000	100.00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,748,674,000	9,676,745,113	99.26
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	267,418,000	256,864,540	96.05
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	13,000,000	13,000,000	100.00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	81,014,000	80,925,002	99.89
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	55,608,000	53,061,550	95.42
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3,950,000	3,949,800	99.99
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	267,418,000	267,030,025	99.85
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,901,600,000	5,867,615,750	99.42
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49,020,000	48,964,000	99.89
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	18,250,000	18,238,000	99.93
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56,000,000	55,463,900	99.04
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21,900,000	21,887,900	99.94
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	187,115,000	179,907,100	96.15
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	14,600,000	14,593,000	99.95

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	73,000,000	72,219,686	98.93
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	92,000,000	88,493,388	96.19
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	306,890,000	303,787,650	98.99
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1,599,091,000	1,598,690,272	99.97
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	69,800,000	68,970,000	98.81
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	671,000,000	663,083,550	98.82
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,105,859,000	5,080,465,389	99.50
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	343,006,000	337,987,903	98.54
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,950,000	2,950,000	100.00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100,158,000	85,531,006	85.40
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,001,200,000	3,001,158,000	100.00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8,090,000	8,074,000	99.80
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	3,000,000	2,978,000	99.27
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9,000,000	8,590,000	95.44
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,333,395,000	1,329,580,000	99.71
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50,000,000	49,755,880	99.51
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	15,000,000	14,669,200	97.79

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	90,500,000	90,237,000	99.71
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	70,560,000	70,419,000	99.80
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	29,000,000	28,817,400	99.37
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	50,000,000	49,718,000	99.44
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	81,800,000	81,613,500	99.77
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	45,125,000	45,101,000	99.95
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6,000,000	6,000,000	100.00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,625,000	20,625,000	100.00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	13,000,000	12,976,000	99.82
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5,500,000	5,500,000	100.00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	36,675,000	36,512,500	99.56
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6,500,000	6,497,500	99.96
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25,675,000	25,525,000	99.42
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4,500,000	4,490,000	99.78
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14,795,323,000	13,273,716,000	89.72

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14,795,323,000	13,273,716,000	89.72
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	859,750,000	835,167,000	97.14
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	13,935,573,000	12,438,549,000	89.26

### 3.4. PRESTASI YANG DIRAIH

#### ➤ Anugrah Dwija Praja Nugraha



Anugrah Dwija Praja Nugraha merupakan anugerah tertinggi Pengurus Besar PGRI tahun 2025 kepada Kepala Daerah yang memiliki komitmen, dedikasi, dan perhatian yang tinggi kepada pembangunan pendidikan dan para guru di daerah yang di pimpin.

➤ Apresiasi Bunda PAUD Nasional Wiyata Dharma Madya



Bunda PAUD Kota Pekalongan (Hj. Inggit Soraya, S.Sn., M.M) memperoleh Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2025 kategori Wiyata Dharma Madya yang dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas dedikasi Bunda PAUD dalam peningkatan kualitas layanan PAUD, implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah, dan inovasi program. Penghargaan ini sekaligus mengakui peran krusial Bunda PAUD dalam mendorong PAUD berkualitas, holistik, dan integratif.

➤ Apresiasi Bunda PAUD Propinsi



Dalam Apresiasi Bunda PAUD tingkat propinsi, Bunda PAUD Kota Pekalongan memperoleh 7 penghargaan, yaitu :

- ✓ Peringkat 1 Bunda PAUD Kabupaten / Kota
- ✓ Peringkat 1 Inovasi
- ✓ Peringkat 1 Tata kelola
- ✓ Peringkat 1 Kolaborasi
- ✓ Peringkat 2 Peningkatan mutu
- ✓ Peringkat 2 Advokasi
- ✓ Bunda PAUD Peduli

➤ Apresiasi Sekolah Teraktif dalam Aksi Nyata Sahabat Sekolah Dasar



Apresiasi ini merupakan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diberikan kepada sekolah teraktif dan berinovasi dalam aksi nyata implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Apresiasi ini menyoroti praktik baik, budaya positif, dan kreativitas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta karakter siswa. SD Negeri Medono 01 Kota Pekalongan memperoleh apresiasi dalam kategori Sekolah Teraktif dalam Pelaporan Aksi Nyata.

- Apresiasi Video Inspiratif Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Afirmatif



Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekalongan memperoleh juara ke -1 Apresiasi Video Inspiratif Layanan Pendidikan Kesetaraan dan Afirmatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

### 3.5. Inovasi

#### 1. PEDATI (Pengolah Data Profil pendidikan Terintegrasi)

PEDATI (Pengolah Data profil Pendidikan) merupakan sebuah inovasi berupa aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bersama Institut Widya Pratama (IWIMA) Pekalongan untuk mempercepat proses pengumpulan serta pengolahan data sehingga

akses layanan informasi bagi masyarakat dan stake holder terkait menjadi lebih mudah, up to date dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, pengiriman data dari operator sekolah akan lebih cepat terkumpul sehingga segera bisa dilanjutkan dengan proses verifikasi dan pengolahan data. Dengan demikian informasi seputar pendidikan dapat lebih cepat diakses oleh masyarakat.

2. ULD-LAKONDIK (Unit Layanan Disabilitas-Layanan Konseling Pendidikan)

Merupakan Inovasi pelayanan yang ditujukan kepada peserta didik dan masyarakat yang memiliki permasalahan pembelajaran, tumbuh kembang dan isu pendidikan keluarga.

3. DOLAN PAUD ( Wadulan Anak PAUD )

Inovasi yang ditujukan sebagai bentuk pendekatan terhadap anak-anak PAUD, maka setiap periodik dilaksanakan kegiatan “Dolan PAUD” dengan didampingi oleh Bunda PAUD Kota Pekalongan, dengan harapan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD capaian 100,13% atau interpretasi sangat berhasil.

#### Sasaran 2

Meningkatnya capaian SPM pendidikan dan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan capaian 87,77% atau

interpretasi berhasil.

### Sasaran 3

Terimplementasinya kurikulum muatan lokal sekolah dengan indikator Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal capaian 100,13% atau interpretasi sangat berhasil

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan tahun 2025.

Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 228.089.854.182 atau 92,19% dari total pagu anggaran sebesar Rp 247.425.579.000.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Faktor sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan dan rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok rentan , ditunjukkan dengan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun yang ada di Kota Pekalongan yang belum mendapatkan layanan pendidikan
- b. Keterbatasan tenaga pendidik maupun pendamping yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), baik untuk pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan
- c. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Di sisi lain, beban administrasi guru yang tinggi berpotensi mengurangi fokus pada peningkatan kualitas layanan Guna peningkatan kinerja di masa mendatang, diperlukan langkah

ke depan sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Bapperida, Kelurahan, serta unsur masyarakat dalam penanganan ATS
- b. Mengupayakan adanya kerjasama dengan kelurahan dalam upaya

mendekatkan layanan pendidikan kesetaraan kepada para ATS yang telah bekerja maupun memiliki kendala lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan semangat ATS untuk kembali bersekolah

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang berwenang mengelola pendidikan khusus (SLB) dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten menangani siswa berkebutuhan khusus

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 14 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



MABRURI, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19710503 199303 1 006

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target						Sumber Data
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP Tahun N	Indeks	74,50	76,00	77,50	78,00	78,20	78,40	Inspektorat
2	Meningkatnya Capaian SPM Pendidikan dan Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	((Persentase Capaian SPM jenjang PAUD + Persentase Capaian SPM Jenjang SD + Persentase Capaian SPM jenjang SMP + Persentase Capaian SPM kesetaraan) dibagi 4 (empat) + ketercukupan PTK) dibagi 2 (dua)	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
3	Terimplementasinya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah sekolah formal	Persen	100	100	100	100	100	100	Bidang Sekolah Dasar (SD), Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pekalongan, 09 Desember 2024  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

  
**ZAINUL HAKIM, S.H., M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650211 199403 1 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MABRURI, S.Pd.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

MABRURI, S.Pd.  
NIP. 19710503 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

**Unit Kerja: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan**

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,43 indeks	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9,75 tahun	Formulasi : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik
3.	Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan keagamaan	100 persen	Formulasi : Jumlah satuan pendidikan yg menerapkan kurikulum pendidikan karakter / jumlah satuan pendidikan) + (Jumlah satuan pendidikan yg mengajarkan pelajaran agama/ jumlah satuan pendidikan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	78,20 indeks	Formulasi : Nilai SAKIP Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya capaian SPM pendidikan dan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	Formulasi : Capaian SPM Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik
3.	Terimplementasinya kurikulum muatan lokal sekolah	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	100 persen	Formulasi : Jumlah sekolah formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal / jumlah sekolah formal Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dindik

**Program**

1. Pengelolaan Pendidikan
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Pengembangan Kurikulum
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Anggaran**

Rp 57.699.214.000  
Rp 14.795.323.000  
Rp 81.800.000  
Rp 165.876.732.000

**Keterangan**

APBD  
APBD  
APBD  
APBD

**Wali Kota Pekalongan**

  
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

**Pekalongan, 20 Agustus 2025**

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan**

  
MABRURI, S.Pd.  
NIP. 19710503 199303 1 006



**Jl. Maninjau No.16-18 Kota Pekalongan**



**@dindikpekalongankota**



**@dindik@pekalongankota.go.id**



**Telp/fax.(0285)421878**

**“Penguatan Akuntabilitas dan  
Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah.”**

